



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/385 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

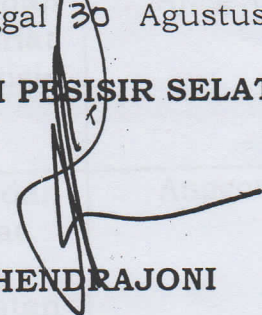
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ini mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap dan mengawasi pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rianan
Pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

LAMPIRAN I: BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 061/385 /Kpts/BPT-PS/2017****TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Hendrajoni, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah	
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah	
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Junaidi, S.Kom., M.E	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
5.	Junilia Armayanti, S.Kom	Kabag Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
6.	Hj. Emirda Ziswati, SE, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	H. Gunawan, S.Sos, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Ahda Yanuar, S.Kom	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9.	Rahmi Hayati, SH	Kasubbag Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Nova Liswanty, SE	Kasubbag Kelembagaan & Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M	Kasubbag Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

12.	Ukuf Harafat, SH.M.CIO	Kasubbag Ketatalaksanaan & Layanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Muhamad Kadri, S.A.P	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
14.	Roni Rahmadona	Pengolah Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Yuli Fitriani	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	Ira Juniati	Pengadministrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
17.	Ompi Surianti	Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
18.	Masriyal	Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 061/385/Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Arsip	Sekretariat Daerah	Anggota Pokja
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Anggota Pokja
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektorat	Anggota Pokja
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Anggota Pokja
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota Pokja
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Pokja
7.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota Pokja
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota Pokja
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota Pokja
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota Pokja
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Anggota Pokja
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota Pokja
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perikanan	Anggota Pokja
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota Pokja

15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota Pokja
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pangan	Anggota Pokja
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Pokja
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Anggota Pokja
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Pokja
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota Pokja
21.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota Pokja
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota Pokja
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota Pokja
24.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Pokja
25.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pendapatan	Anggota Pokja
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota Pokja
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota Pokja
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Pokja
29.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota Pokja
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	RSUD M. Zein Painan	Anggota Pokja

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI